



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS



RENJA

(RENCANA KERJA)

DINAS P3AP2KB

TAHUN 2024

A L A M A T :

JALAN PEMBANGUNAN SAMBAS KODE POS. 79400
TELP. 0562-391004 FAX. 0562391003

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap OPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta aplikasi kegiatan dan indikator kerja untuk mencapai sasaran pembangunan terkait: 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ini terdapat kekurangan, maka kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.



Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas

FATMA AGHITSNI, S.TP., M.Si.
NIP. 19750628 200003 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	73
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	79
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	99
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	102
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	102
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	105
3.3. Program dan Kegiatan.....	110
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	118
BAB V PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	(T-C.29.) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	14
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja	55
Tabel 2.3	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mencapai Target.....	56
Tabel 3.1	(Tabel T-C.30) Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	72
Tabel 5.1	(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).....	80
Tabel 6.1	(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).....	100
Tabel 7.1	(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017).....	101
Tabel 8.1	Matrik Tujuan/Sasaran Tahun 2021-2026.....	107
Tabel 9.1	Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110
Tabel 10.1	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Skpd).....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas merupakan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**. Misi ke-3, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dari 5 misi yang diemban melalui penyelenggaraan Program Unggulan **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani) dan Program Unggulan **Pelayanan diktan** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) RPJMD sebagai sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Selain itu RKPD tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga tingkat pusat, untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2023 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

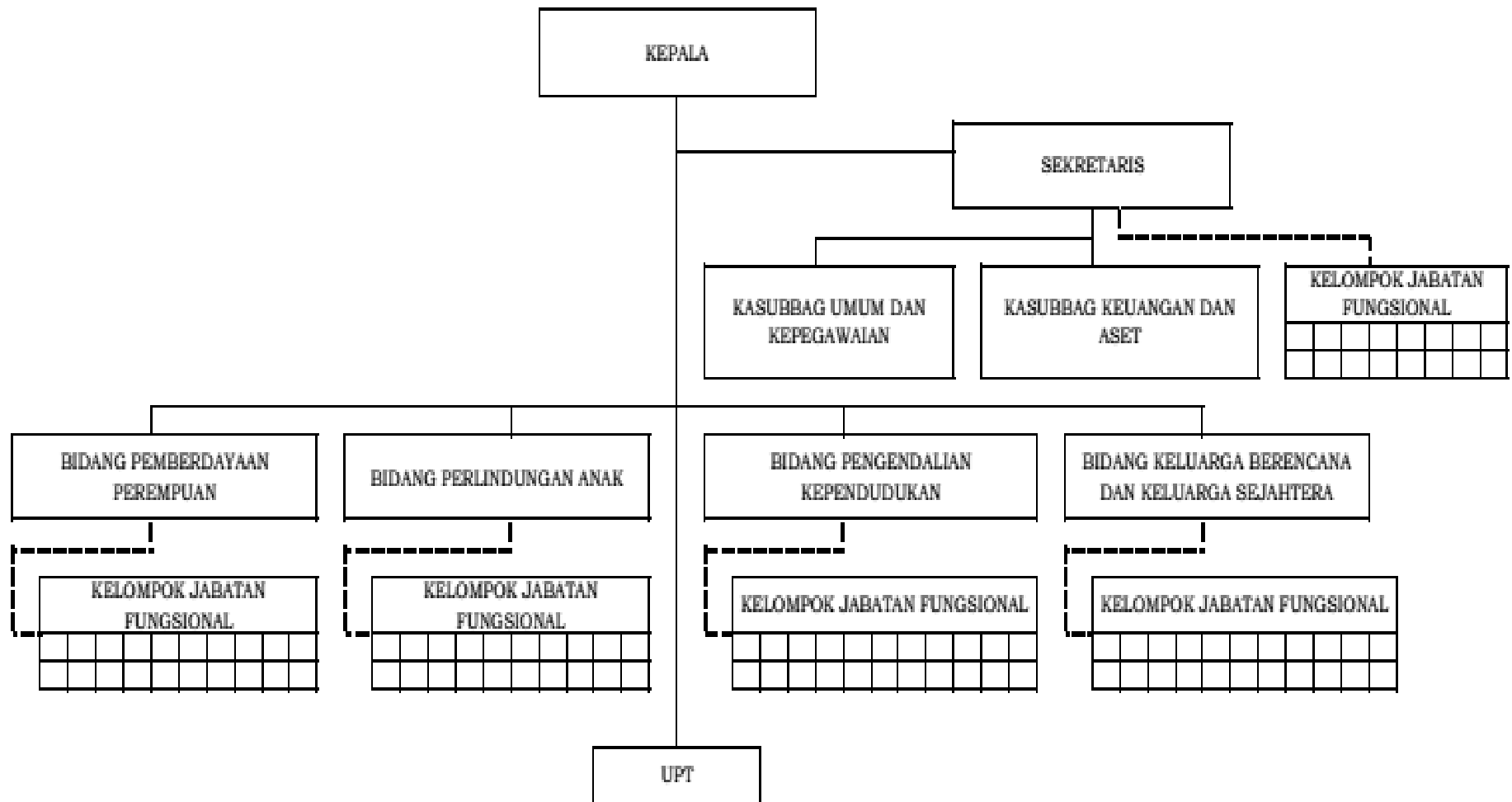
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan

dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas terdiri dari:

1. Kepala
2. Bagian Sekretariat membawahi :
 - a. Fungsional Perencana
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Perlindungan Anak membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Pengendalian Kependudukan membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 1
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sbb:



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

- 17) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 96) (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 96);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023);
- 23) Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2016-2020;
- 24) Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas;
- 25) Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 94);

- 26) Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 73 Tahun 2023);
- 27) Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2024
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok–pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*), Pencapaian NSPK, SPM, Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan, Pencapaian Kualitas Hidup Anak, dan Pencapaian Kualitas Keluarga dan Penduduk;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

dan

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Revisi). Adapun penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun berjalan sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024; dan
- e. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun berjalan telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Pemilihan indikator dan target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, hasil penyusunan pohon kinerja dan ketersediaan data sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah. *Core business* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sebagai organisasi perencana disajikan dalam tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

Tabel 2.1 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Kode	Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) (2019-2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+7+10)	12=(11/5)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Tujuan:	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	AA kategori	100%	100%	100%	100%	100%	33%	BB Kategori
	Sasaran:	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	AA kategori	100%	100%	100%	100%	100%	33%	BB Kategori

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya capaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	66%
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	200%	1 dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 Dokumen	50%
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	3 Dokumen	50%

2.08.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66%
2.08.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66%
2.08.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/bulan	59 Orang/bulan	33 Orang/bulan	32 Orang/Bulan	97%	33 Orang/bulan	124 Orang/Bulan	62,62%
2.08.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0	2 Dokumen	33%
2.08.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
2.08.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	4 Laporan	66%

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2.08.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	3 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	4 Laporan	66%
2.08.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	4 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	2 Laporan	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	2 Laporan	33%

2.08.01. 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 Laporan	2 Laporan	33%
2.08.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	4 Laporan	66%
2.08.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	4 Laporan	66%
2.08.01. 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	4 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45 Unit	2 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	4%
2.08.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	2 Dokumen	33%
2.08.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	4 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	4 Dokumen	66%

2.08.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	4 orang	1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	4 orang	66%
2.08.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66%
2.08.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	4 Paket	66%
2.08.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66%
2.08.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66%
2.08.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66%
2.08.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66%
2.08.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%

2.08.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272 Laporan	46 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100%	43 Laporan	129 Laporan	47%
2.08.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2.08.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2.08.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	2 Unit	15%
2.08.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	4 unit	2 Unit	2 unit	100%	2 Unit	6 Unit	45%
2.08.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	16%
2.08.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	16%
2.08.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	9%

2.08.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	1 Unit	16%
2.08.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
2.08.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
2.08.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	33%
2.08.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
2.08.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	36 Unit	6 unit	0 Unit	0 Unit	0%	6 Unit	12 Unit	33%

	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya								
2.08.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	5 unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	12 Unit	34%
2.08.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	9 unit	10 Unit	10 Unit	100%	11 Unit	30 Unit	43%
2.08.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	170 Unit	20 unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	52%
2.08.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	11 Unit	1 unit	0	0	0%	2 Unit	3 Unit	27%
2.08.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	50%
2.08.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	4 unit	0 Unit	0 Unit	0%	6 Unit	10 Unit	27%
2.08.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	4 unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	9 UNit	31%
2.08.01. 2.13	Penataan Organisasi	Meningkatkan Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%

			Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
2.08.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Tujuan 1:	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,26%	65,92%	65,26%	65,92%	101%	67,26%	IDG dirilis oleh BPS setelah tahun berjalan (sekitar bulan april tahun 2024)	NA
	Sasaran 1 :	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5 per 100.000 penduduk perempuan	8,8 per 100.000 penduduk perempuan	9 per 100.000 penduduk perempuan	8,5 per 100.000 penduduk perempuan	94%	8 per 100.000 penduduk perempuan	8,4 per 100.000 penduduk perempuan	32%
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	100%	60%	60%	55%	91%	70%	44%	64%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Focal point PUG	20 organisasi perangkat daerah	23 organisasi perangkat daerah	8 organisasi perangkat daerah	8 organisasi perangkat daerah	100%	18 organisasi perangkat daerah	18 organisasi perangkat daerah	90%

2.08.02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	1 Dokumen	25%
2.08.02. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.08.02. 2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	100%	0 dokumen	16 perangkat daerah	80%
2.08.02. 2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 perangkat daerah	8 perangkat daerah	0	0	0%	11 perangkat daerah	11 perangkat daerah	55%

2.08.02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	4 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	1 Sektor	100%	2 Sektor	3 Sektor	75%
2.08.02. 2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.08.02. 2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	0 dokumen	2 Dokumen	40%
2.08.02. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	2 Lembaga	3 Lembaga	60%
2.08.02. 2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	200%	0 lembaga	3 Lembaga	60%

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan								
2.08.02. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	140 Orang	100 Orang	100 Orang	170 orang yang dibina dalam bentuk SDM Gabungan Organisasi Wanita	170%	110 Orang	380 orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas	271%
2.08.02. 2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Dokumen	3 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	5 Dokumen	8 dokumen	100%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.03. 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	60%
2.08.03. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	60%

	Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0%	0 perangkat daerah	2 Perangkat Daerah	28%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	4 Orang	7 Orang	0 orang	0 orang	0%	6 Orang	3 Orang	75%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	5 Layanan	0 layanan	0 layanan	0%	5 Layanan	3 Layanan	60%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	12 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga	2 Lembaga	25%	2 Lembaga	1 Lembaga	83%

	Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.03. 2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	1 Laporan	20%	
2.08.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	225 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	100 Orang	44%	
2.08.03. 2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	30 Orang	10 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	10 Orang	33%	
2.08.03. 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%	

2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	65,5%	63.30%	63,5%	62,66%	98%	64%	Untuk TPAK perempua n tahun 2023 baru dirilis oleh BPS pada tahun 2024 sekitar bulan april 2024	NA
2.08.04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	15 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	500%	2 Kegiatan	8 Kegiatan	53%
2.08.04. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	0 Perangk at Daerah	0 Perangk at Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	50%
2.08.04. 2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 Dokume n	0 Dokume n	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.08.04. 2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	60%

		Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Dibina	15 Lembaga	1 Lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0%	0 lembaga	1 Lembaga	6%
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	1 Lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0%	0 lembaga	1 Lembaga	20%
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	0 Orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 Orang	0%
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	8 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	8 Dokumen	44%

2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	15 Layanan	1 Layanan	0 layanan	0 layanan	0%	0 layanan	1 Layanan	6%
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalamDaerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	1 Layanan	0 layanan	0 layanan	0%	0 layanan	1 Layanan	20%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan PenyajianData Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan PenyajianData Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak	20 organisasi perangkat daerah	6 organisasi perangkat daerah	0 organisasi perangkat daerah	0 organisasi perangkat daerah	0%	11 organisasi perangkat daerah	17 organisasi perangkat daerah	85%
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	1 Dokumen	100%

2.08.05. 2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
	Tujuan 2 :	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
	Sasaran 2 :	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	570 poin	336,05 poin	300 poin	336,05 poin	112%	400 poin	404,3 poin	70%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	290 poin	162,25 poin	185 poin	220 poin	118%	215 poin	210,2 poin	72%
2.08.06. 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	25 Gugus Tugas	2 Gugus Tugas	5 Gugus Tugas	5 Gugus Tugas	100%	5 Gugus Tugas	12 Gugus Tugas	48%
2.08.06. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media	25 Organisasi	1 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	5 Organisasi	11 Organisasi	44%

			dan Dunia Usaha								
2.08.06. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	46%
2.08.06. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	104 LRA	20 LRA	20 LRA	20 LRA	100%	20 LRA	60 LRA	57%
2.08.06. 2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	40 Orang	50 Orang	50 orang	100%	40 Orang	130 Orang	59%
2.08.06. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
2.08.06. 2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%

2.08.06. 2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dokumen	3 dokume n	2 Dokume n	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokuemn	70%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	110 poin	68,8 poin	75 poin	78 Poin	104%	80 poin	114,30 Poin	103%
2.08.07. 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/ Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	208 Kasus	44 Kasus	44 Kasus	65 Kasus	52%	44 Kasus	153 Kasus	126%
2.08.07. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	5 Perangk at Daerah	10 Perangk at Daerah	10 Perangkat daerah	100%	5 Perangkat Daerah	20 Perangkat daerah	80%
2.08.07. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

2.08.07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%
2.08.07. 2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	44 orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	144 Orang	57%
2.08.07. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	250 layanan	44 Layanan	0 layanan	0 layanan	0	50 Layanan	94 Layanan	37%
2.08.07. 2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.08.07. 2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	5 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

		Kabupaten/Kota	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/ Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Lembaga Layanan	1 Lembaga Layanan	1 Lembaga Layanan	1 lembaga Layanan	100%	1 Lembaga Layanan	1 layanan Lembaga	100%
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	2 Laporan	0 laporan	0 laporan	0	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 Dokumen	2 Dokumen	40%

			Kewenangan Kabupaten/Kota									
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Tujuan 3 :	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	61,9%	80,86%	57,9%	63,4	110%	58,9%	68,56	110%	
	Sasaran 3.1 :	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak (penduduk usia 0-18 tahun) yang ada dalam satu keluarga.	1,2 orang	1,62 orang	1,37 orang	1,36 orang	101%	1,33 orang	1,13 orang	109%	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pengendalian pertambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,50 orang	3,75 orang	3,70 orang	3,68 orang	109%	3,25 orang	3,65 Orang	95%	
2.14.02. 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka PengendalianKuantitas Penduduk	Meningkatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	19 dokumen	5 dokume n	5 dokume n	5 dokumen	100%	2 dokumen	12 Dokumen	80%	
2.14.02. 2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,Kelu arga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	6 Dokumen	1 Dokume n	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	16%	
2.14.02. 2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand DesignPembanguna n Kependudukan (GDPK) Tingkat	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	6 Dokumen	0 dokume n	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%	

	Kabupaten/Kota	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota								
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	34 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80%	6 Dokumen	10 Dokumen	29%
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	34 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80%	0 dokumen	8 Dokumen	24%
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	6 Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

	Lokal Kabupaten/Kota	Lokal Kabupaten/Kota	Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota								
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	24 Satuan Pendidikan	0 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	0%	0 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	0%
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	24 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	20 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisasi	0	0	0	0%	0	0	0%

2.14.02. 2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0 organisasi	0%	0 organisasi	0 organisasi	0%
2.14.02. 2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	120 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
2.14.02. 2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1%	0	4 Laporan	16%
2.14.02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	6 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit	3 Unit	50%
2.14.02. 2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Dirumuskannya Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
2.14.02. 2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	17 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	1 Dokumen	6%

2.14.02. 2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusnya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02. 2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Terlaksananya Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02. 2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02. 2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02. 2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	Terlaksananya Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	Jumlah Dokumen hasil Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	6 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.14.02. 2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan diKampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	30 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	0 Unit	8 Unit	27%
2.14.02. 2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanSis	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	28 Laporan	4 Laporan	0	0	0%	4 Laporan	8 Laporan	28%

	tem Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	30 Dokumen	4 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	4 Dokumen	13%
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	28 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	57%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	29 Laporan	4 Laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
	Sasaran 3.2 :	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,80%	11%	17%	14%	117%	16%	12.3%	102%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	90,28%	87%	88%	86%	98%	89%	87%	99%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana	19 kecamatan	9 kecamatan	10 kecamatan	10 kecamatan	100%	12 kecamatan	19 Kecamatan	100%

	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2.14.03. 2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	60 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	100%	10 Organisasi	10 Organisasi	50%
2.14.03. 2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	28 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	43%
2.14.04. 2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1220 Laporan	tda	19 Laporan	19 Laporan	100%	242 Laporan	242 Laporan	33,33%
2.14.03. 2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan	114 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	57 Unit	50%

		KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								
2.14.03. 2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
2.14.03. 2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah kecamatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	19 kecamatan	19 Kecamatan	19 kecamatan	19 Kecamatan	100%	19 kecamatan	19 Kecamatan	100%
2.14.03. 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	114 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	50%

			(Minilok)								
2.14.03. 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	114 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	50%
2.14.03. 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	28 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	43%
2.14.03. 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	27 orang	22 orang	23 orang	23 orang	100%	24 orang	24 orang	100%
2.14.03. 2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	193 Organisasi	193 Organisasi	193 Organisasi	193 Organisasi	100%	193 Organisasi	193 Organisasi	100%
2.14.03. 2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	114 Unit	19 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	19 Unit	17%
2.14.03. 2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	100%

	Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 orang	100%	200 Orang	600 Orang	50%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	324 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	100%	54 Laporan	162 Laporan	50%
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang	12 Orang	2 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	2 Orang	17%

			Pelayanan KB								
2.14.03. 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1051 orang	190 Orang	190 Orang	688 orang	362%	200 Orang	1078 Orang	103%
2.14.03. 2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	30 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
2.14.03. 2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	114 Dokumen	19 Dokume n	19 Dokume n	19 Dokumen	100%	19 Dokumen	57 Dokumen	52%
2.14.03. 2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	15 Unit	17 Unit	283%
2.14.03. 2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3230 orang	380 Orang	0 orang	0 orang	0%	0 Orang	380 orang	12%
2.14.03. 2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	114 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	57%
2.14.03. 2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan	3230 orang	380 Orang	380 Orang	2640 orang	694%	475 Orang	3495 Orang	108%

	Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan								
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	324 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2280 orang	380 Orang	380 Orang	380 Orang	100%	380 Orang	1140 orang	50%
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	60 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanandan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	21,77%	19,65%	15,81%	16,2%	102%	17,30%	18,10%	83%
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi	114 Organisasi	19 Organisasi	19 Organisasi	19 Organisasi	100%	19 Organisasi	57 Organisasi	50%

	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	204 orang	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	100%	34 Dokumen	102 Dokumen	50%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	204 Kampung	34 Kampung	34 Kampung	34 Kampung	100%	34 Kampung	34 Kampung	50%
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	204 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 laporan	100%	34 Laporan	34 Laporan	50%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	96,15%	19,20%	19,20%	12,2%	61%	38,40%	59,00%	61%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	96,15%	19,20%	19,20%	12,2%	61%	38,40%	59%	61%
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita	1158 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0%	0 kelompok	0 kelompok	0%

	Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk								
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	342 Unit	57 Unit	57 Unit	7 Unit	12%	57 Unit	121 Unit	35%
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1452 Laporan	242 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	242 Laporan	16%
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1452 Orang	242 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	242 Orang	16%

		Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 Orang	25 Orang	25 Orang	1455 orang (485 TPK x 3 Anggota)	5820%	25 Orang	1248 orang (416 TPK x 3 Anggota)	832%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	726 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0 Kelompok	0%
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1452 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	1452 Laporan	242 Laporan	242 Laporan	5 Laporan	20%	0 Laporan	247 Laporan	17%

		Keuangan Keluarga)	Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								
2.14.04. 2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.04. 2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.04. 2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2280 Orang	380 Orang	380 Orang	380 Orang	100%	380 Orang	1140 Orang	50%
2.14.04. 2.01.12	Sosialisasi IPK	Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	4560 Orang	760 Orang	760 Orang	760 Orang	100%	760 Orang	2280 Orang	50%
2.14.04. 2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
2.14.04. 2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	92 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%	0 Keluarga	0 Keluarga	0%

	Keluarga Berkualitas	Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	90,28%	87%	87,66%	85,34%	97%	88,53%	88,44%	98%
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	3 Organisasi	50%
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan	6 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	1 Laporan	16%

	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0 Organisasi	0%	0 Organisasi	1 Organisasi	16%
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	114 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	57 Laporan	50%

Batasan ukuran yang digunakan untuk penetapan program/kegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target pada tahun ketiga renstra 2021-2026 sebesar 60%. Program/kegiatan yang telah mencapai 60% atau lebih terhadap renstra dikategorikan telah mencapai target, sementara yang capaiannya lebih kecil dari 60% dikategorikan belum mencapai target.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) menunjukkan terdapat 6 kegiatan (14,28%) yang tidak memenuhi target kinerja renstra yang direncanakan. Kegiatan dengan capaian kinerja masih jauh dari target yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja masing-masing 6%.

Tabel 2.2
Program/Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja

Kode	Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	53%
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Dibina	6%
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	6%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	48%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	57%

	AnakKewenangan Kabupaten/Kota		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	50%

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan;

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) menunjukkan terdapat 36 program/kegiatan (85,72%) yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut yaitu:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mencapai Target

Kode	Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%

		Pemerintah Daerah	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	64%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Focal point PUG	90%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	75%
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	60%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	60%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	83%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan	Jumlah OPD Yang	85%

	Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	72%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	103%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	126%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	95%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	80%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	99%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana	100%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	100%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	83%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	61%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Cakupan Anggota	61%

	melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R) yang di bina	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	98%

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) menunjukkan tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target capaian kinerja.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/rendahnya realisasi kinerja terhadap target renstra 2021-2026 adalah karena:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menganalisa konsistensi perencanaan penganggaran sehingga kurang optimal dalam menunjang pencapaian kinerja;
2. Keterbatasan ketersediaan dana yang belum sesuai kebutuhan berdampak pada penurunan realisasi target renja tahunan dibanding dari target renstra;
3. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat secara konsisten atas program dan kegiatan yang telah di sosialisasikan atau dicanangkan berdampak pada tidak berlanjutnya program. Hal ini menghambat proses pencapaian target berkelanjutan kinerja renstra;
1. Ketidak tepatan waktu, tempat, dan orang pada saat implementasi kegiatan terhadap rencana kegiatan berdampak pada bergesernya sistematisa rencana;
2. Masih ada kegiatan yang harusnya pada tahun 2023 renstra dialokasikan namun

tidak dialokasikan sehingga realisasi kinerja program/kegiatannya tidak dapat sepenuhnya dievaluasi;

3. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan sesuai dengan skala prioritas;
4. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kovergensi;
5. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Ketersediaan informasi/data yang memadai mutlak diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sambas.

Implikasi juga merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian

Program Renstra Perangkat Daerah terhadap sasaran RPJMD, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak
3. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga

Adapun implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra sebagai berikut:

- Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender
- Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
- Meningkatnya pengendalian penduduk
- Meningkatnya kualitas keluarga

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
- b) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- c) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang
- d) Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak

Sedangkan Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,
- b) Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria dalam KB.

- c) Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi relative masih rendah.
 - d) Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.
 - e) Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendah.
 - f) Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.
 - g) Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas :

1. Mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal kemampuan menganalisis konsistensi perencanaan penganggaran melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek, seminar, kaji banding guna meningkatkan capaian program/kegiatan;
2. Mendorong optimalisasi pengelolaan program/kegiatan melalui kemitraan terutama dengan OPD lain dan LSM yang bergerak pada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Meningkatkan advokasi, monitoring dan evaluasi secara kontinyu serta membuat perjanjian kerja sama terutama di lokasi center program/kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Membagi habis tugas dalam struktur tim pelaksana program/kegiatan agar saat pelaksanaan terhadap rencana dapat tepat waktu, tepat tempat dan tepat orang;
5. Penyusunan renja agar menitik beratkan pada konsistensi terhadap Renstra Perangkat Daerah guna menjamin tercapainya visi misi pemerintah Daerah.
6. Memperkuat metode penetapan prioritas dengan tetap mempertimbangkan

proporsional rasionalisasi anggaran.

7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui perbaikan sistem pencatatan pelaporan yang terintegrasi antar perangkat daerah terkait.
8. Meningkatkan pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Peraturan Menteri PP-PA No. 10 tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2019, yang mengatur secara rinci yang disusun sebagai dasar pijakan dan memberikan panduan kinerja para pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, ataupun lembaga-lembaga masyarakat, juga perguruan tinggi yang turut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah.
- b) Memberikan pendidikan atau pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan perempuan sehingga kaum perempuan mampu melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki. Selanjutnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sambas.
- c) Memberikan pelatihan dan dan bimbingan teknis terkait PUG kepada semua pejabat focal point OPD (inspektorat, Bakeuda, Bappeda, dan Dinas P3AP2KB) terdiri dari sekretaris dan ka subag sunram tentang analisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang harus dibuktikan dengan lampiran dokumen Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement (GAP/GBS) dengan nara sumber tim pakar dari kementerian PPPA.
- d) Medorong peningkatan peran serta aktif seluruh anggota kelompok P2TP2A dan UPPA dalam mengedukasi masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan

keseluruhan program dan kegiatan Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada PUS (Pasangan Usia Muda) dan remaja akan manfaat Program KB ditingkat kecamatan hingga desa tentang pentingnya pengetahuan tentang Program Kependudukan dan KB
- b) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada para suami dari PUS terkait risiko dan manfaat KB Jangka Panjang (MKJP) dan kesertaan pria dalam KB.
- c) Melakukan penyuluhan terpadu dan terintegrasi tentang KESPRO sejak dini serta berbagai akibat buruk dari penyakit menular seksual kepada masyarakat sasaran yang juga mencakup sekolah/remaja;
- d) Pembinaan terhadap tenaga PLKB dan PKB dan membagi tugas sebagai pandamping bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD secara berkala serta berkelanjutan.
- e) Menjalin kemitraan dengan media massa serta pengadaan baliho, banner, leaflet dan kelender pada kecamatan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mempromosikan/menggalakan Program KB
- f) Mendorong tersedianya prasarana untuk membentuk Rumah Data di Kampung KB
- g) Melakukan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan dan pelaksanaan pembentukannya serta pengadaan Pojok Kependudukan di sekolah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan urusan wajib, sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel.T-C.30).

Jika dilihat Tabel 2 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kondisi yang berfluktuatif dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun, peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh

1) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
- b. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- c. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang
- d. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,
- b. Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria dalam KB.
- c. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi relative masih rendah.
- d. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.
- e. Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendah.
- f. Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.

- g. Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa.

Tabel 3. (Tabel T-C.30,
Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				Capain Kinerja Tahun				Poyeksi		Catatan Analisa
			2021	2022	2023	Tren	2021	2022	2023	Tren	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,26 %	69,03 %	NA	Meningkat	79%	105,7 %	NA	Meningkat	71%	73%	Data tidak terwakili karena belum tersedia
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	300 poin	336,05 poin	404,3 poin	Meningkat	105,3 %	112,02 %	101%	Fluktuatif		435 poin	
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per Wanita)	2,21	2,61 (Hasil PK 21)	2,61 (Hasil PK 21)	Meningkat (data tersedia per lima tahun)	67%	119%	119%	Meningkat (data tersedia per lima tahun)		>2,61	Data tidak terwakili untuk analisa tahunan
		2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	57,9%	60,30 %	63,40 %	Meningkat	108,1 %	109,50 %	107%	Tetap		66,10%	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	16,80 %	12,50 %	12,30 %	Meningkat	120,2 %	126,79 %	76%	Meningkat		10,8	
		4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	21%o	38,6 (Hasil PK 21)	38,6 (Hasil PK 21)	Meningkat (data tersedia per lima tahun)	63,2%	111%	111%	Meningkat (data tersedia per lima tahun)		>38,6	Data tidak terwakili untuk analisa tahunan
		5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (Tahun)	22.0	21,1 (Hasil PK 21)	21,1 (Hasil PK 21)	Meningkat (data tersedia per lima tahun)	108%	100%	100%	Meningkat (data tersedia per lima tahun)		>21,1	Data tidak terwakili untuk analisa tahunan
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	70	50,84 % (Hasil PK 21)	50,84 % (Hasil PK 21)	Meningkat (data tersedia per lima tahun)	50,84 %	72,62 %	72,62 %	Meningkat (data tersedia per lima tahun)		>50,84	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021 yang sejalan dengan visi dan misi antara lain:

3) Isu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a). Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- i. Ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG kabupaten Sambas meningkat sebesar 0,96% (87,96%) pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 dan lebih besar sebesar 0,35% dari capaian Provinsi Kalimantan Barat (87,61%) (BPS, 2022). IDG kabupaten Sambas meningkat sebesar 3,11% (69,03%) pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 dan peningkatan ini lebih besar sebesar dari peningkatan IDG Provinsi Kalimantan Barat yang hanya meningkat sebesar 2,04%, namun masih di bawah capaian provinsi (73,18%) (BPS, 2022). Sampai dengan batas waktu renja ini harus disampaikan data IDG dan IPG tahun 2023 belum tersedia;
- ii. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
- iii. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang

responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;

- iv. Tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
- v. Menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19.

b) Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- i. Kabupaten Sambas masih belum mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak. Sebanyak 374 kabupaten/kota atau 72,76% termasuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak dengan berbagai peringkat di Indonesia pada tahun 2023, lebih tinggi dari Kalimantan barat yang baru mencapai 35,71% (5 Kab/Kota). Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 404,3 poin (target 400 poin). Hal ini menunjukkan proses menuju Kabupaten Layak Anak masih sesuai peta perencanaan RENSTRA 2021-2026; dan
- ii. Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah; sekolah ramah anak; pusat kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P).

c) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- i. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- ii. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - iii. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:
- i. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas;
 - ii. Makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar daerah;
 - iii. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;
 - iv. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - v. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;
 - vi. Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan; dan
 - vii. Dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan perempuan.
- e) Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:
- i. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik;
 - ii. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus; dan

- iii. Dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.

4) Isu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan diantaranya struktur penduduk Kabupaten Sambas dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sambas mencapai 67,04% pada tahun 2020 dan masih berada diposisi Bonus Demografi pada tahun 2023 (Sensus Penduduk, 2020).
- b) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar:
 - i. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.
 - ii. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4%. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menysasar pasangan usia muda/ pasangan millenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi.

- iii. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmet need*) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, *unmet need* terus mengalami penurunan walaupun terjadi luktiasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi *unmet need* sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB;
 - iv. Prevalensi *stunting* masih tinggi: *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.
- c) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa:
- i. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem

Informasi Keluarga). Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan

- ii. Pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Dalam laporan “Perkawinan Usia Anak di Indonesia” yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1 persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Sambas. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas disusun melalui tahapan – tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026. Perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Renja perangkat daerah (proses *bottom-up* dan *top-down*). Rangkaian tahapan penyusunan RKPD dan Renja OPD berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan termasuk besaran pagu anggaran yang bertambah/berkurang dari usulan awal.

Tabel 5.
(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	4.396.747.731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	4.396.747.731
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.121.243	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.121.243
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.569.264	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.569.264
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.717.489	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.717.489
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.717.489
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.964.534	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.964.534
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.717.489	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.717.489
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.174.865.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.174.865.767
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas P3AP2KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.077.530.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas P3AP2KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.077.530.245

2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.645.335	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.645.335
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55.337.962	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55.337.962
2.08.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.470.445	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.470.445
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.470.445	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.470.445
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.470.445	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.470.445
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.470.445	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.470.445
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.470.445	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.470.445
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	29.151.248	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	29.151.248
2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.470.446	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.470.446
2.08.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.940.889	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.940.889
2.08.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.717.489	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.717.489
2.08.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.211.578	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.211.578
2.08.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.470.445	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.470.445
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.929.067	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.929.067
2.08.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.411.334	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.411.334

2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	41.997.560	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	41.997.560
2.08.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit	9.881.779	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit	9.881.779
2.08.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.940.889	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.940.889
2.08.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.411.334	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.411.334
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.881.779	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.881.779
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	9.881.779	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	9.881.779
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	227.676.186	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	227.676.186
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.586.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.586.225
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.704.447	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.704.447
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.174.892	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.174.892
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.527.116	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.527.116
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.468.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.468.005
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.336.161	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.336.161
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.470.445	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.470.445
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	49.408.895	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	49.408.895

2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	392.800.712	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	392.800.712
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	98.817.789	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	98.817.789
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	12.352.224	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	12.352.224
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.881.779	Pengadaan Mebel	Dinas P3AP2KB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	9.881.779
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.881.779	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.881.779
2.08.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98.817.789	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98.817.789
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	123.522.237	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	123.522.237
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.704.447	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.704.447
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.822.668	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.822.668
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	337.709.795	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	337.709.795
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.717.489	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.717.489
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.056.671	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.056.671
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.245.825	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.245.825
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	276.689.810	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas P3AP2KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	276.689.810
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.238.506	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas P3AP2KB	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	147.238.506

2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2.470.446	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2.470.446
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.952.712	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas P3AP2KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.952.712
2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas P3AP2KB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.940.889	Pemeliharaan Mebel	Dinas P3AP2KB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.940.889
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	14.822.668	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	14.822.668
2.08.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	2Unit	7.411.334	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	2Unit	7.411.334
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.113.342	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.113.342
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24.704.447	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24.704.447
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	14.822.668	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas P3AP2KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	14.822.668
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Dinas P3AP2KB	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	26.186.714	Penataan Organisasi	Dinas P3AP2KB	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	26.186.714
2.08.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dinas P3AP2KB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	26.186.714	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dinas P3AP2KB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	26.186.714
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	60%	496.521.385	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	60%	496.521.385
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Fokal point PUG	8 organisasi perangkat daerah	220.676.171	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Fokal point PUG	8 organisasi perangkat daerah	220.676.171
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043

2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 perangkat daerah	55.169.043	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 perangkat daerah	55.169.043
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 perangkat daerah	55.169.042	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 perangkat daerah	55.169.042
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1 Sektor	110.338.085	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1 Sektor	110.338.085
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.169.043
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	55.169.042	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	55.169.042
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	1 Lembaga	165.507.129	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	1 Lembaga	165.507.129
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	55.169.043	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	55.169.043
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	55.169.043	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	55.169.043
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	55.169.043	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	55.169.043

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	1.158.549.897	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	1.158.549.897
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	1 Dokumen	193.091.649	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	1 Dokumen	193.091.649
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.565	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.565
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	110.338.084	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	110.338.084
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100%	275.845.214	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100%	275.845.214
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	6 Orang	165.507.129	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	6 Orang	165.507.129
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	110.338.085	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	110.338.085
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	8 Lembaga	689.613.034	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	8 Lembaga	689.613.034
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	165.507.128	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	165.507.128
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125 Orang	275.845.214	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	125 Orang	275.845.214
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	165.507.128	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	165.507.128

2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.564	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.564
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Sambas	Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,5%	772.366.598	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Sambas	Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,5%	772.366.598
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	1 Kegiatan	386.183.299	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	1 Kegiatan	386.183.299
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	165.507.128	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	165.507.128
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	110.338.085	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	110.338.085
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	110.338.086	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	110.338.086
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Dibina	1 Lembaga	275.845.214	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Dibina	1 Lembaga	275.845.214
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	55.169.043	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	55.169.043
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	165.507.128	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	165.507.128
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	55.169.043	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	55.169.043
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	1 Layanan	110.338.085	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	1 Layanan	110.338.085

2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	110.338.085	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	110.338.085
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Sambas	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	55.169.043	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Sambas	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100%	55.169.043
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak	8 organisasi perangkat daerah	55.169.044	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak	8 organisasi perangkat daerah	55.169.044
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	27.584.522	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	27.584.522
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.584.522	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.584.522
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Sambas	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	185 poin	402.734.012	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Sambas	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	185 poin	402.734.012
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	5 Gugus Tugas	176.540.937	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	5 Gugus Tugas	176.540.937
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	137.922.607	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	137.922.607
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.618.330	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.618.330
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	20 LRA	226.193.075	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	20 LRA	226.193.075
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	82.753.564	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	82.753.564
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.342.974	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.342.974

2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.564	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	82.753.564
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.342.973	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.342.973
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Sambas	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	75 poin	271.431.690	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Sambas	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	75 poin	271.431.690
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	44 Kasus	47.997.067	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	44 Kasus	47.997.067
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	30.342.974	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	30.342.974
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.654.093	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.654.093
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	168.265.580	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	168.265.580
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	19.309.165	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	19.309.165
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	110.338.085	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	110.338.085
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.309.165	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.309.165
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.309.165	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.309.165

2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Lembaga Layanan	55.169.043	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Lembaga Layanan	55.169.043
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.584.521	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.584.521
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.792.261	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.792.261
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.792.261	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.792.261
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Sambas	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,70 orang	900.632.222	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Sambas	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,70 orang	900.632.222
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka PengendalianKuantitas Penduduk	Kabupaten Sambas	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	5 dokumen	532.929.956	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka PengendalianKuantitas Penduduk	Kabupaten Sambas	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	5 dokumen	532.929.956
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	1 Dokumen	20.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	1 Dokumen	20.000.000
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117.922.608	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	117.922.608
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	62.753.564	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	62.753.564
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 Dokumen	22.584.521	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 Dokumen	22.584.521

2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	5 Dokumen	22.584.521	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	5 Dokumen	22.584.521
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kabupaten Sambas	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	22.584.521	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kabupaten Sambas	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	22.584.521
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	4 Laporan	31.408.572	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	4 Laporan	31.408.572
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	4 Dokumen	27.584.521	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	4 Dokumen	27.584.521
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	17.000.000	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	17.000.000
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	17.000.000	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 Organisasi	17.000.000
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Laporan	103.922.607	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Laporan	103.922.607
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	27.584.521	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	27.584.521
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	4 unit	367.702.266	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	4 unit	367.702.266
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	10.000.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	10.000.000

2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5 Dokumen	81.167.991	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5 Dokumen	81.167.991
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	16.550.713	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	16.550.713
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000	Pemetaan Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen hasil Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	1 Dokumen	10.000.000	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen hasil Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>EarlyWarning System</i> /Peringatan Dini)	1 Dokumen	10.000.000
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan diKampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	Kabupaten Sambas	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	4 Unit	27.584.521	Membentuk Rumah Data Kependudukan diKampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	Kabupaten Sambas	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	4 Unit	27.584.521
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanSistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	27.583.788	Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanSistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	27.583.788
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran DataKeluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	27.584.521	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran DataKeluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	27.584.521
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 Dokumen	87.578.593	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 Dokumen	87.578.593
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 Laporan	11.033.809	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 Laporan	11.033.809
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	11.033.809	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	11.033.809
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan	27.584.521	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan	27.584.521
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kabupaten Sambas	Rasio Akseptor KB	87,66%	6.694.338.130	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kabupaten Sambas	Rasio Akseptor KB	87,66%	6.694.338.130
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangsa Kencana	10 kecamatan	1.391.459.204	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangsa Kencana	10 kecamatan	1.391.459.204

2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	10 Organisasi	27.584.521	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	10 Organisasi	27.584.521
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	27.584.521	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	27.584.521
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Unit	119.318.502	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Unit	119.318.502
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 Dokumen	246.053.818	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 Dokumen	246.053.818
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah kecamatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	19 kecamatan	146.193.616	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah kecamatan Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	19 kecamatan	146.193.616
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 Laporan	27.584.521	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 Laporan	27.584.521
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Laporan	769.555.184	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Laporan	769.555.184
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	27.584.521	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	27.584.521
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	23 orang	1.188.923.411	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	23 orang	1.188.923.411
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	193 Organisasi	539.914.868	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	193 Organisasi	539.914.868

2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	19 Unit	110.338.085	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	19 Unit	110.338.085
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 Laporan	27.584.521	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 Laporan	27.584.521
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	511.085.937	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	511.085.937
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	1.300.334.336	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	1.300.334.336
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54 Laporan	634.443.991	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54 Laporan	634.443.991
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Orang	8.275.356	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Orang	8.275.356
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	190 Orang	13.792.261	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	190 Orang	13.792.261
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	5.516.904	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	5.516.904
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Dokumen	27.584.521	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Dokumen	27.584.521
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	331.014.256	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	331.014.256
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	380 Orang	27.584.521	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	380 Orang	27.584.521

2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	55.169.043	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	55.169.043
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	380 Orang	82.753.564	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	380 Orang	82.753.564
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Sambas	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	54 Orang	28.687.902	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Sambas	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	54 Orang	28.687.902
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	52.410.591	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	52.410.591
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	380 Orang	16.550.713	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	380 Orang	16.550.713
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	16.550.713	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	16.550.713
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Persentase peserta KB baru	15,81%	2.813.621.179	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Persentase peserta KB baru	15,81%	2.813.621.179
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Organisasi	82.753.564	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Organisasi	82.753.564
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	34 Dokumen	104.821.181	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	34 Dokumen	104.821.181
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34 Kampung	750.298.981	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34 Kampung	750.298.981
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	1.875.747.453	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	34 Laporan	1.875.747.453
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kabupaten Sambas	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,20%	935.777.303	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kabupaten Sambas	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	19,20%	935.777.303

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R) yang di bina	19,20%	901.020.807	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R) yang di bina	19,20%	901.020.807
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	193 Kelompok	20.964.237	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	193 Kelompok	20.964.237
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	57 Unit	27.584.521	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	57 Unit	27.584.521
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Laporan	11.033.810	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Laporan	11.033.810
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Orang	20.964.238	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Orang	20.964.238
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Orang	8.385.694	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Orang	8.385.694
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	121 Kelompok	31.446.354	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	121 Kelompok	31.446.354
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Laporan	198.608.554	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	242 Laporan	198.608.554

2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	242 Laporan	49.652.138	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	242 Laporan	49.652.138
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	104.821.181	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	104.821.181
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	27.584.521	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	27.584.521
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	380 Orang	187.574.745	Advokasi dan Promosi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	380 Orang	187.574.745
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	760 Orang	200.000.000	Sosialisasi IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	760 Orang	200.000.000
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	2.758.452	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	2.758.452
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Keluarga	9.642.362	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Keluarga	9.642.362
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	87,66%	34.756.497	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	87,66%	34.756.497
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	2.758.452	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	2.758.452

2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	5.516.905	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	5.516.905
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	5.516.904	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	5.516.904
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	19 Laporan	20.964.236	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	19 Laporan	20.964.236

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Sambas yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dimana terdapat 13 kegiatan hasil musrenbang yang di dengan sklala proiritas 1-5 disampaikan dalam Forum OPD. Tersebar sebagai berikut: 1)masing-masing sebesar 15,38% (2 keg) untuk prioritas 2; 2)sebesar 23% (3 keg) untuk prioritas 3; 3)sebesar 15,38% (2 keg) untuk prioritas 4; dan 4) sebesar 66,34% (6 keg) untuk prioritas 5. Hasil pembahas lanjut hasil melalui forum OPD yang menyesuaikan hasil musrenbang tingkat kecamatan dengan tugas pokok dan fungsi didapat hasil seluruh usulan diterima. (Tabel 6).

Selain musrenbang, usulan program dan kegiatan masyarakat juga diakomudir melalui masa reses DPRD dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Adapun rekaputulasi Pokir yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024

No.	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Indikator Kinerja	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Prioritas hasil Musrenbang Kecamatan
PEMERINTAHAN						Desa	Kec.	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					453.000.000			
1	Pelatihan Pembuatan Makanan Bergizi	030.049-018	1 Kegiatan	Peningkatan keterampilan ibu balita dalam pengelolaan makanan	20.000.000	Sejiram	Tebas	2
2	Pembinaan PKK dan Kader KB	050.108-039	2 Paket	Peningkatan pemahaman kinerja petugas	100.000.000	Dungun laut	Jawai	2
3	Pelatihan Tata Rias Pengantin dan Pengadaan Perlengkapan dekorasi	030.042-023	1 Paket	Pengembangan usaha keluarga dalam rangka pemberdayaan perempuan	50.000.000	Pusaka	Tebas	3
4	pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	042.097-031	1 Kegiatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	15.000.000	Sepuk tanjung	Sebawi	3
5	Pelatihan PKK dan Kader KB	050.117-015	1 Paket	Peningkatan pemahaman kinerja petugas	10.000.000	Sei nilam	Jawai	3
6	Fasilitas Kegiatan Bagi Kelompok Perempuan	030.047-017	60 Orang	Pengembangan pemberdayaan perempuan	16.000.000	Dungun perapakan	Tebas	4
7	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	042.097-030	1 Kegiatan	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	15.000.000	Sepuk tanjung	Sebawi	4
8	Peningkatan Kapasitas kelompok Perempuan	010.001-014	1 Kelompok	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	10.000.000	Semelagi besar	Selakau	5
9	Pelatihan Bidang Kesehatan mendukung (Kampung KB)	011.013-020	2 Kali	Peningkatan cakupan Bangga Kencana	50.000.000	Seranggam	Selakau timur	5
10	Pelatihan menjahit	020.022-013	1 Paket	Peningkatan keterampilan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga	50.000.000	Gugah sejahtera	Pemangkat	5
11	Pelatihan Ibu PKK dan Kader KB	050.110-027	45 OK	Peningkatan pemahaman kinerja petugas	11.000.000	Sei nyirih	Jawai	5
12	Pelatihan Kelompok Perempuan	070.170-027	1 Paket	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	6.000.000	Sepantai	Sejangkung	5
13	Pencegahan dan Penanganan Stunting	080.186-018	1 Kegiatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan stunting	100.000.000	Sei bening	Sajingan besar	5

Tabel 7.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

N o	Kode Pokir	Usulan	Permasalahan	Alamat	Catatan OPD	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Rekom. OPD
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan							600.000.000 ,-	
1	501340	2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Penyelenggaraan Kegiatan Organisasi PKK Kab. Sambas	PKK Kab. Sambas	Sesuai Tugas Pokok dan fungsi OPD dalam pemberdayaan perempuan termasuk peran para perempuan pedamping pimpinan (PILDA)	1	paket	100.000.000,-	100.000.000,-	DITERIMA
2	503019	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan potensi menjahit untuk Perempuan	Kab Sambas	Sesuai Tugas Pokok dan fungsi OPD terkait pemberdayaan perempuan dalam hal peran serta perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	paket	30.000.000,-	30.000.000,-	DITERIMA
3	503045	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan potensi menjahit untuk Perempuan	Kab Sambas	Sesuai Tugas Pokok dan fungsi OPD terkait pemberdayaan perempuan dalam hal peran remaja perempuan sebagai generasi penerus, calon ibu yang sehat dan produktif; terdapat 2 desa Kampung KB di Kecamatan Selakau	1	paket	70.000.000,-	70.000.000,-	DITERIMA
J U M L A H SP3AP2KB									750.000.000 ,-	DITERIMA

Sumber: SIPD RI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas mengampu bidang ketugasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oleh karena itu, program dan kegiatan di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas harus menyesuaikan program, kegiatan dan kebijakan dari Kementerian tersebut.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh Kementerian PPPA. Tujuan dan sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2020-2024 sesuai Visi dan Misi Kemen PPPA dalam penyelenggaraan urusan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- d) Indeks Pengarus Utamaan Gender (PUG) Nasional.

- 2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-2 adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b) Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c) Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d) Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-3 adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b) Indeks Kualitas Keluarga.
- 4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-4 adalah sebagai berikut:
- a) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
 - b) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
 - c) Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
- 5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 adalah sebagai berikut:
- a) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
 - b) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
 - c) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
 - d) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BKKBN merumuskan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan ditetapkan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.

- b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- d) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age SpecificFertilityRatio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- e) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- f) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas untuk menentukan prioritas program dan kegiatan. Kebijakan ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama OPD tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)
- 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49.

Berdasarkan kebijakan di atas ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - b) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- 2) Urusan Penegndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
 - b) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan keluarga berencana

Adapun program prioritas untuk mencapai sasaran tersebut di atas sebagai berikut :

- 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - b) Program Pengendalian Penduduk

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai pada kurun waktu tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas pada periode 2021- 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan cara :

- 1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak

3. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun matrik sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Matrik Tujuan/Sasaran Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN PD	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	TARGET KINERJA				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indikator ini merupakan indeks komposit yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-des)}{3}$ dimana : I(par) : Indeks keterwakilan di parlemen I(DM) : Indeks pengambilan keputusan I(inc-des) : Indeks distribusi pendapatan	65,26%	67,26%	69,26%	71,26%	73,26%
1.1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Perbandingan Perempuan korban kekerasan dan TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100.000$	9	8	7	6	5
2	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan	Anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan dalam situasi darurat, anak yang	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dikalikan	100%	100%	100%	100%	100%

		layanan komprehensif	berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Layanan Konprehensif adalah sistem layanan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	100%					
2.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak	Hasil nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak	300	400	500	530	570

			Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten menjadi layak anak, Indikator KLA menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Setiap indikator diberikan ukuran dan nilai yang akan dihitung dalam Evaluasi KLA. Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak						
3	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	Pasangan Usia Subur yang menggunakan suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu	Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%	57,9%	58,9%	59,9%	60,9%	61,9%
3.1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Rata-rata jumlah anak (penduduk usia 0-18 tahun) yang ada dalam satu keluarga.	Jumlah anak dibagi jumlah keluarga	1,37	1,33	1,28	1,24	1,2
3.2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	Kebutuhan pasangan usia subur untuk berKB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi (TIAL) atau ingin anak ditunda (IAT) tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%	16,80%	15,80%	14,80%	13,80%	12,80%

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tahun 2024 tersebar dalam 10 Program, 28 kegiatan, 192 sub kegiatan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan prioritas dalam upaya mencapai tujuan dilengkapi dengan indikator masing-masing sesuai dengan PAGU Platfond anggaran sementara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Pagu Platfond Sementara Tahun 2024

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Plafond Sementara	Indikator
I	IKU DP3AP2KB		Rp. 14.329.473.631,00	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (67,26%); Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (100%); dan Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) (58,9%)
I	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.777.277.902,00	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (100%)
1	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.580.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 dokumen)
a	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.200.000,00	Jumlah Dokumen Renja DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
b	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 12.340.000,00	Jumlah Dokumen RKA/DPA DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
c	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.870.000,00	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
d	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.170.000,00	Jumlah Dokumen LAKIP DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
2	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.113.900.376,00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah selama 1 Tahun (2 dokumen)
a	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.987.400.376,00	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun (1 tahun)
b	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 111.500.000,00	Jumlah Pengelola Keuangan yang mendapat honorarium selama 1 Tahun (11 orang)
c	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 7.500.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
d	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 7.500.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran DP3AP2KB Kabupaten Sambas (1 dokumen)
3	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,00	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selama 1 Tahun (1 orang)
a	2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 10.000.000,00	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek (1 orang)
4	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 347.491.840,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 Tahun (6 kegiatan)

a	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 39.982.000,00	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia selama 1 Tahun (10 jenis)
b	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 49.950.000,00	Jumlah jenis barang kebutuhan kantor selama 1 Tahun (30 jenis)
c	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 99.959.840,00	Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun (36 Jenis)
d	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 70.000.000,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (19 jenis)
e	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 10.800.000,00	Jumlah Koran dan Majalah selama 1 Tahun (2 jenis)
f	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 76.800.000,00	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah yang terlaksana (41 kali)
5	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 70.000.000,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 kegiatan)
a	2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 50.000.000,00	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (1 unit)
b	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.000.000,00	Jumlah Pengadaan Komputer Unit lainnya (1 unit)
6	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 896.392.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (3 kegiatan)
a	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.200.000,00	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat (520 lembar)
b	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 70.214.400,00	Jumlah penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun (4 jenis)
c	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 716.335.509,00	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor (39 orang)
7	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 279.493.686,00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Kegiatan)
a	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 104.360.000,00	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 1 Tahun (6 unit)
b	2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp. 10.000.000,00	Jumlah Meubeler yang dipelihara (4 jenis)
c	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 45.000.000,00	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (3 jenis)
d	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 120.133.686,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab setiap tahun (3 gedung)
8	2.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Rp. 31.420.000,00	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian selama 1 Tahun (1 Tahun)
a	2.08.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 31.420.000,00	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi valid dan akurat setiap tahun (1 tahun)
II	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 621.200.000,00	Persentase OPD Yang melaksanakan ARG/PPRG (60%)
9	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 191.200.000,00	Jumlah OPD yang membuat dokumen ARG/PPRG (8 organisasi)
a	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 110.850.000,00	Jumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki dokumen ARG/PPRG (8 organisasi)
b	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 80.350.000,00	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG (8 organisasi)

10	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 145.000.000,00	Jenis Sektor Pada Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (500 orang)
a	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 145.000.000,00	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (500 orang)
11	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 285.000.000,00	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina (100 orang)
a	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 285.000.000,00	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan yang mendapat peningkatan kapasitas (100 orang)
III	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 168.636.934,00	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (100%)
12	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.320.000,00	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri (7 kegiatan)
a	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.320.000,00	Jumlah rumusan kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (3 kebijakan)
13	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 46.317.000,00	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi (50 orang)
a	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 46.317.000,00	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (5 layanan)
14	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.999.934,00	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina (125 orang)
a	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 99.999.934,00	Jumlah kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (125 orang)
IV	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 140.000.000,00	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (11 orang/100.000 penduduk)
15	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000,00	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak (500 orang)
a	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000,00	Jumlah peserta kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup keluarga (500 orang)
V	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK	Rp. 8.800.000,00	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak (100%)
16	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.800.000,00	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak (8 organisasi)

a	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 8.800.000,00	Jumlah pemanfaatan data gender dan anak dalam urusan pembangunan dan perencanaan kebijakan kewenangan (8 organisasi)
VI	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 640.000.000,00	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yaitu Nilai bobot klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegia
17	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 250.000.000,00	Jumlah Satuan Gugus Tugas Desa/Kecamatan layak anak yang dikembangkan (5 Gugus Tugas Desa Layak Anak dan 1 Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak)
a	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 164.200.000,00	Jumlah Desa/Kecamatan yang dikembangkan Menjadi Desa/Kecamatan Layak Anak (5 desa/ 1 kec)
b	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 85.800.000,00	Jumlah Forum Anak Desa dan kecamatan yang dikembangkan (3 forum anak)
18	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 390.000.000,00	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak (10 LRA)
a	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000,00	Jumlah Fasilitas yang dikembangkan menjadi Layanan Ramah Anak (10 fasilitas)
b	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 70.000.000,00	Jumlah orang yang mendapatkan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (200 orang)
c	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000,00	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (2 kegiatan)
d	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000,00	Jumlah Kegiatan penguatan jejaring Peningkatan Kualitas Hidup Anak (2 kegiatan)
VII	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 521.375.000,00	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yaitu nilai bobot klaster 5 (perlindungan khusus anak) (Meningkat 3 %)
19	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 231.180.000,00	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (turun menjadi 58 kasus)
a	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 200.100.000,00	Jumlah Regulasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (5 regulasi)

b	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 31.080.000,00	Jumlah Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak (2 kegiatan)
20	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 280.095.000,00	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditangani (70%)
a	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.600.000,00	Jumlah Penyedia Layanan yang Dikembangkan (2 Penyedia Layanan)
b	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 190.295.000,00	Jumlah pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap anak (58 kasus)
c	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 45.200.000,00	Jenis Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2 jenis)
21	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.100.000,00	Jumlah Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2 Penyedia Layanan)
a	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.100.000,00	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (50 Orang)
VIII	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 110.000.000,00	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (3,95)
22	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp. 70.000.000,00	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal (5 kerja sama)
a	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp. 25.000.000,00	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal (4 kegiatan)
b	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Rp. 25.000.000,00	Jumlah kegiatan Sosialisasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (4 kegiatan)
c	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp. 10.000.000,00	Jenis Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (4 jenis)
d	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rp. 10.000.000,00	Jumlah kegiatan Rapat Pengendalian Program KKBPK (4 kegiatan)

23	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000,00	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB (4 rumah data)
a	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Rp. 10.000.000,00	Jumlah Data kependudukan yang akurat (5 jenis)
b	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rp. 30.000.000,00	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang di bentuk Untuk memperkuat integrasi program KKBPK (4 rumah data)
IX	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 6.803.809.500,00	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) (11,92%)
24	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.811.181.500,00	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana (10 kec)
a	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp. 15.000.000,00	Jumlah Kegiatan Pertemuan Peran Serta Stakeholders dan Mitra Kerja yang Mendukung Operasional Program Bangga Kencana (4 kegiatan)
b	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 15.000.000,00	Jumlah Kecamatan yang dilakukan KIE Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (4 kec)
c	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Rp. 216.277.500,00	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK (19 kec)
d	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp. 80.000.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (19 kec)
e	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Rp. 55.000.000,00	Jumlah Kecamatan dalam menggunakan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK (19 kec)
f	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 1.394.904.000,00	Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
g	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Rp. 35.000.000,00	Jumlah kegiatan Pengendalian Program KKBPK (4 kegiatan)
25	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 1.021.959.995,00	Jumlah Penyuluh KB yang didayagunakan dalam melaksanakan program Bangga kencana (23 orang)
a	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp. 75.560.995,00	Jumlah desa yang mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (193 desa)
b	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Rp. 10.000.000,00	Jumlah PKB/PLKB yang mendapatkan sarana pendukung operasional (19 balai KB)
c	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp. 10.000.000,00	Jumlah Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK) (4 orang)
d	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp. 926.399.000,00	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang di bina program Bangga Kencana (193 desa)
26	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Rp. 2.757.292.005,00	Rasio Akseptor KB Baru (67,36%)

		Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
a	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 131.768.000,00	Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (19 kecamatan)
b	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp. 1.051.399.000,00	Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (19 kecamatan)
c	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 1.429.125.005,00	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB (1 unit)
d	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Rp. 145.000.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (19 Kegiatan)
27	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 1.213.376.000,00	Rasio Akseptor KB Baru (67,36%)
a	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 50.000.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (19 Kegiatan)
b	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp. 963.376.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (34 Kp.KB)
c	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp. 200.000.000,00	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (34 Kp.KB)
X	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 887.275.000,00	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga (4.544 orang)
28	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 887.275.000,00	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R) yang di bina (4.544 orang)
a	2.14.04.2.01.02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 84.875.000,00	Jumlah Sarana KIT Siap Nikah
b	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 607.400.000,00	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang memiliki biaya operasional (121 kelompok)
c	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rp. 145.000.000,00	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang mendapatkan pembinaan (242 kelompok)

d	2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Rp. 50.000.000,00	Jumlah peserta Sosialisasi IPK (40 orang)
---	-----------------	-----------------	-------------------	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Skpd)
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp14.465.511.193
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp5.164.241.354
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.106.122.228
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp25.566.744
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.047.410
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp3.553.116
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp2.840.829
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp3.470.558
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp5.393.553
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp2.411.721
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.849.557
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.995.052.186
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.887.651.132
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp87.600.000
2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp5.119.734
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.090.259
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp5.367.605
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp4.223.456
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp31.373.258
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp4.447.485
2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp21.681.013
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp5.244.760
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp12.790.000

2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp12.790.000
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp268.032.942
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp29.637.559
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp31.561.507
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp32.466.678
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp34.421.198
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.000.000
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp130.946.000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp541.130.164
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp14.031.600
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp70.435.100
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp456.663.464
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp178.332.000
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp128.500.000
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp12.590.000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp37.242.000
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Rp53.844.934
2.08.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp53.844.934
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp134.366.573
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp9.345.573
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp9.345.573
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp125.021.000
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp125.021.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp263.724.730
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp40.383.623
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp40.383.623
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.340.989
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.340.989
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp210.000.118
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp210.000.118

2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp291.483.933
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp291.483.933
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp91.484.201
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp199.999.732
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp13.885.116
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.885.116
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.885.116
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA	Rp113.606.800
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp49.446.230
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp49.446.230
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp64.160.570
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp43.391.141
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.769.429
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp241.051.974
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp86.393.128
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Rp27.720.365
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Rp58.672.763
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp154.658.846
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp122.776.171
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp31.882.675
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp9.301.269.839
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp440.496.086
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp104.796.086
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Rp70.000.000
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp34.796.086

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp335.700.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp159.000.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp176.700.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Rp5.604.133.934
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp1.420.799.813
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Rp139.999.996
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Rp630.800.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp285.000.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp99.999.690
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp65.000.127
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp200.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp633.999.815
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Rp579.000.000
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga	Rp54.999.815
	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.019.688.994
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp18.000.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Rp570.819.000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp2.409.669.994
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp21.200.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp529.645.312
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp113.895.312
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp415.750.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Rp3.256.639.819
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp428.799.914
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Rp28.800.000

2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Rp300.000.000
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga Indeks Pembangunan Keluarga)	Rp99.999.914
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp2.827.839.905
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rp207.039.905
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp1.248.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp1.372.800.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Strategi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program- program dan kegiatan-kegiatan yang akan datang, dimana telah direncanakan suatu Rencana Kerja tahun 2024 maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tahun 2024 terdiri dari 10 program dan 89 kegiatan termasuk kegiatan rutin, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan.

